Vol. 2, No. 2, Agustus 2024 *(134-141) E-ISSN: 3025-0099*
DOI: https://doi.org/10.64405/jm.v2i2.96

Jurnal Miftahul Ulum
Pendidikan dan Ekonomi
Email : jnmu.staimu@gmail.com / **Publisher : IAI Miftahul Ulum**
https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/junamu

Kontribusi BUMD dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus pada PT. Pelabuhan Kepri)

Hartoto
IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, Indonesia
e-mail: ir.hartoto@gmail.com

Sirly Deska Yana Putri
IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, Indonesia
e-mail: Sirlyofficial@gmail.com

Abstrak

Latar belakang masalah dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi kontribusi BUMD dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau studi kasus pada PT. Pelabuhan Kepri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD Provinsi Kepulauan Riau tepatnya pada PT. Pelabuhan Kepri. penelitian ini adalah penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif. penelitian ini yang menjadi fokus analisis adalah kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD pada PT. Pelabuhan Kepri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Perusahaan mengalami keuntungan usaha pada tahun 2019. Selanjutnya tahun 2020-2022 mengalami kerugian dalam usaha. Dengan demikian, perusahaan belum maksimum dalam mendapatkan laba usaha sebagai sumber PAD. Karena seringnya merugi dalam usaha, maka yang terjadi jumlah aset yang sudah mencapai sebesar Rp.48.328.490.000,00 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah aset menjadi sebesar Rp. 46.731.688.835,00 dan tahun 2022 jumlah aset menjadi sebesar Rp.38.430.521.222,00. Dengan demikian maka BUMD PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) belum optimal dan masih kurang efektif dalam berkontribusi terhadap PAD.
Kata Kunci : *Kontribusi; Efektivitas; BUMD; PAD*

Abstract

The background of the problem in this research is to edit the contribution of BUMD in increasing the Regional Original Income (PAD) of the Riau Islands Province, a case study at PT. Riau Islands Harbor. This research aims to determine the contribution of BUMD in increasing the Regional Original Income (PAD) of the Riau Islands Province, precisely at PT. Riau Islands Harbor. This research is a mixed qualitative and quantitative research. The focus of this research is the contribution of BUMD in increasing PAD at PT. Riau Islands Harbor. This research uses data collection techniques using interview and observation methods. From the research results, after the data has been processed, it can be seen from the profit generation that the company made a profit in 2019. Then, starting from 2020-2023, it experienced losses in business.

Thus, the company has not achieved maximum operating profits. Due to frequent losses in business, what happened was that the amount of assets that had reached IDR 48,328,490,000.00 continued to decline. In 2021 total assets will be IDR. 46,731,688,835.00 and in 2022 the total assets will be IDR 38,430,521,222.00. Thus, BUMD PT. The Riau Islands Port (Perseroda) is not yet optimal and is still less effective in contributing to Regional Original Income (PAD).
***Keywords**: Contribution; Effectiveness; BUMD; PAD*

PENDAHULUAN

Undang Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada intinya ketiga UU tersebut memberikan amanat kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan dalam otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2002 dibentuk sebagai pemekaran dari Provinsi Riau. Dalam pembentukannya mempertimbangkan luas wilayah, kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi Daerah, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan lainnya. Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Dalam pemerintahannya, daerah telah diberikan otonomi yang cukup luas. Namun demikian, masing-masing daerah memiliki pilihan prioritas dalam menangani pemerintahan dan kelembagaan.

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam PP tersebut diatur secara lebih luas BUMD. Berdasarkan penilaian pemerintah sampai tahun 2017, BUMD masih dianggap: (a). Belum memiliki etos kerja, (b). Terlalu birokratis, (c). Inefisien, (d). Kurang berorientasi pasar, (e). Tidak memiliki reputasi yang baik, (f) Tidak profesionalisme,(g). Intervensi yang berlebihan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap BUMD.

Peranan BUMD sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. Adapun upaya untuk mendorong peran BUMD dalam pembangunan daerah melalui: (a). Usaha rintisan sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, (b). Menyeimbangkan kekuatan pasar, dan (c). Turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

Provinsi Kepulauan Riau mendirikan BUMD PT. Pelabuhan Kepri diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2013 yang diperbarui melalui Perda No. 7 Tahun

2021. Pendirian PT. Pelabuhan Kepri bertujuan: (a). Mengelola dan memanfaatkan potensi alam dan geografis, perairan daerah melalui penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang memiliki aksesibilitas tinggi, andal dan terintegrasi; (b). Berperan serta menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha bagi masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian Daerah; (c). Memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan (d) Meningkatkan sumber PAD.

Berdasarkan hasil penelitian Hartoto (2017) di Provinsi Kepulauan Riau baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimalnya pemasukan dari PAD termasuk kontribusi BUMD. Penelitian tersebut ternyata ditemukan juga oleh Antika, Ike Juni (2017) di Kota Bandarlampung, Funangi, Usman, dkk (2017) di Provinsi Papua, dan penelitian Heince J., Vekie A., Debby Ch. (2019) di Sulawesi Utara.

Bagaimana dengan kondisi terkini dan secara khusus pada BUMD PT. Pelabuhan Kepri yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada penelitian ini akan menghimpun data selama tahun 2018-2022 terutama untuk menjawab pertanyaan penelitian kontribusi BUMD Provinsi Kepulauan Riau dalam peningkatan PAD yang secara khusus dilakukan studi pada BUMD PT. Pelabuhan Kepri. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas BUMD PT. Pelabuhan Kepri dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan analisa terkait kinerja BUMD Provinsi Kepulauan Riau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan campuran metode kuantatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk data-data numerik. Sedangkan metode kualitatif dimanfaatkan untuk pengolahan data kualitatif. Dari empat BUMD yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), Tirta Kepri, PT Pembangunan Kepri, dan PT Pelabuan Kepri. Penelitian ini mengambil sampel pada BUMD PT. Pelabuhan Kepri. Waktu yang diperlukan penelitian sekitar empat bulan, yaitu mulai bulan April sampai dengan Juli 2024. Lokasi penelitian di PT. Pelabuhan Kepri.

Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dengan sumber data. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (https://kepriprov.go.id.) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau (https://bpkad.kepriprov.go.id/).

Data yang dikumpulkan data times series selama lima tahun (2018-2022). dan mengukur tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Kriteria Efektivitas PAD

Kategori (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif

(134-141) E-ISSN: 3025-0099
DOI: https://doi.org/10.64405/jm.v2i2.96

<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2010

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. PT tersebut didirikan dengan Perda No. 2 Tahun 2013 dan telah diperbarui dengan Perda No. 7 Tahun 2021 tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah Pelabuhan Kepri. Tujuan pendirian PT adalah untuk: (a). Mengelola dan memanfaatkan potensi alam dan geografis perairan daerah melalui penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang memiliki aksesibilitas tinggi, andal dan terintegrasi; (b). Berperan serta menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha bagi masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah; (c). Memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan (d). Meningkatkan sumber PAD. Kegiatan usahanya meliputi jasa kepelabuhanan dengan penyediaan atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang dan jasa terkait lainnya.

Secara lebih spesifik kegiatan usaha PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) yang telah dilaksanakan sampai tahun 2023 adalah: (a). Labuh tambat dan pemanfaatan lahan di Pelabuhan Sekatap Pulau Dompak; (b). Labuh jangkar di Perairan Tanjung Berakit dan Perairan Kabil Selat Riau; (c).Pengelolaan Kapal M.V. Lintas Kepri; (c). *Marine advisory service*; (d).Pengelolaan Pelabuhan Kuala Riau dan Kota Segara; (e). Jasa cargo barang; dan (f). Speed charter dan crew boat di wilayah Labuh jangkar Kabil Selat Riau dan Tanjung Berakit. (Perda no. 7 Tahun 2021).

Sumber Daya Manusia (SDM) di PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) dengan jumlah 18 orang dengan perincian: komisaris sebanyak 1 orang, direktur sebanyak 1 orang, general manajer sebanyak 1 orang, deputi sebanyak 4 orang, dan staf sebanyak 11 orang. Kedeputian meliputi deputi kepelabuhan dan maritim, deputi pengembangan bisnis dan komersial, deputi perencanaan dan pengendalian operasional, dan deputi administrasi dan keuangan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan minimal satu tahun satu kali dan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir (bulan Juni). Sesuai dengan Perda no. 7 Tahun 2021, PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) memiliki modal dasar sebesar Rp. 190 miliar dengan modal disetor sebesar Rp. 48,30 miliar, terdiri setoran modal Pemprov. Kepri sebesar Rp. 25 miliar dan penyertaan modal barang milik daerah senilai Rp. 23,30 miliar. Koperasi Serba Usaha Amanah Tuah Bintan juga memiliki saham sebesar Rp. 0,025 miliar. Pada awal pendirian modal disetor Pemprov Kepri sebanyak 99,99% dan.Koperasi Serba Usaha Amanah Tuah Bintan sebanyak 0,1%. Sedangkan sesuai dengan Perda no. 7 Tahun 2021, modal perusahaan terbagi dalam saham paling sedikit 51% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi KEPRI.

Model bisnis yang dijalankan oleh PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) melalui kerja sama dengan pihak lain. Model kerja sama dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau peningkatan produktivitas perusahaan, memperbesar perusahaan, efisiensi, dan mengurangi persaingan usaha. Model bisnis lainnya yang juga dilaksanakan adalah dengan melakukan kerjasama dengan mitra strategis untuk berkolaborasi dalam mendukung pengelolaan kawasan labuh jangkar di Kabil Selat Riau dan Tanjung Berakit.

Arah kebijakan strategis PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kepri 2022-2026 adalah terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya. Sedangkan secara spesifik arah kebijakan perusahaan adalah mampu bersaing secara kompeten dalam mengelola wilayah maritim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dan dapat berkontribusi dalam memberikan PAD.

Perusahaan membuat rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun dan harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris. Perusahaan juga harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun dan harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris. RKAP harus diserahkan direksi kepada dewan komisaris paling lambat akhir bulan November dan disetujui dewan komisaris paling lambat akhir bulan Desember tahun sebelumnya.

PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Pengawasan baik secara internal maupun eksternal dalam upaya menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan evaluasi dilaksanakan dalam penilaian kinerja, tingkat kesehatan, dan tingkat layanan pelanggan.

Analisis Realisasi kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda)

Penilaian kinerja perusahaan dilakukan dengan membandingkan antara target atau rencana dengan realisasi yang telah dicapai. Pada penelitian ini secara spesifik dengan tolak ukur adalah kontribusi BUMD PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) dalam peningkatan PAD. Pada penelitian ini menggunakan data tahun 2018-2022. Rencana dan realisasi keuangan PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) tahun 2018-2022 secara lebih terinci terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana dan realisasi keuangan PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan Rp)

Tahun	Uraian	Rencana	Realisasi	Efektivitas
2018	Pendapatan	Rp. 3.854,40	Rp. 3.001,20	77,86
	Biaya	Rp. 3.098,94	Rp. 1.911,58	61,68
	Laba/Rugi	Rp. 755,46	Rp. 1.089,60	144,23

2019	Pendapatan	Rp. 3.854,40	Rp. 3.315,54	86,02
	Biaya	Rp. 3.301,74	Rp. 1.344,74	40,73
	Laba/Rugi	Rp. 552,66	Rp. 1.970,80	356,60
2020	Pendapatan	Rp. 18.084,00	Rp. 1.784,77	9,87
	Biaya	Rp. 13.811,36	Rp. 1.951,82	14,13
	Laba/Rugi	Rp. 4.272,64	(Rp. 167,04)	(3,91)
2021	Pendapatan	Rp. 99.940,00	Rp. 1.673,18	1,67
	Biaya	Rp. 41.820,59	Rp. 4.089,94	9,78
	Laba/Rugi	Rp. 58.119,41	(Rp.2.003,05)	(3,45)
2022	Pendapatan	Rp. 9.186,74	Rp. 3.580,56	38,98
	Biaya	Rp. 8.869,14	Rp. 11.889,50	134,05
	Laba/Rugi	Rp. 317,60	(Rp. 8.308,94)	(2.616,17)

Sumber: PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) (data diolah)

Dari Tabel 2. tingkat efektivitas baik pendapatan, biaya maupun laba atau rugi sangat bervariasi dari tidak efektif sampai sangat efektif. Efektivitas laba pada tahun 2018 sangat efektif (144,23%), pada tahun 2019 sangat efektif (356,60%) selanjutkan tahun 2020-2022 tidak efektif dengan posisi kecenderungan merugi usahanya.

Pendapatan usaha tahun 2018 merupakan pendapatan bidang usaha sewa lahan di Pelabuhan Sekatap dan pengoperasian Kapal MV. Lintas Kepri. Pendapatan usaha pada tahun 2019 dan tahun 2020 selain pendapatan bidang pendapatan bidang usaha sewa lahan di Pelabuhan Sekatap dan pengoperasian Kapal MV. Lintas Kepri juga kontribusi jasa *marine advisory.* Pendapatan usaha tahun 2021 pendapatan bidang usaha sewa lahan di Pelabuhan Sekatap dan pengoperasian Kapal MV. Lintas Kepri juga kontribusi jasa *marine advisory.* Sedangkan pendapatan usaha pada tahun 2022 dan 2023 selain pendapatan bidang labuh jangkar di Tanjung Berakit, dan Selat Riau, pengoperasian Kapal MV. Lintas Kepri juga kontribusi jasa pelayanan kargo.

Apabila tabel 2 terutama laba/rugi dikaitkan dengan pendapatan perusahaan dari non usaha (lain-lain) yang terdiri dari: bunga deposito, jasa giro dan profit sharing modal kepada pihak ketiga, maka pada Tabel 3 yang memperbandingkan antara keuntungan/kerugian usaha setelah dikoreksi dengan pendapatan non usaha.

Tabel 3. Laba/Rugi setelah dikoreksi dengan pendapatan non usaha PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan Rp)

Tahun	Laba/rugi	Pendapatan Non usaha	Laba/rugi Usaha	Efektivitas
2018	Rp. 1.089,60	Rp. 1.090,73	(Rp. 1,13)	0,15
2019	Rp. 1.970,80	Rp. 986,84	Rp. 983,96	178,04
2020	(Rp. 167,04)	Rp. 862,64	(Rp. 1.029,68)	(24,10)
2021	(Rp. 2.003,05)	Rp. 431,58	(Rp. 2.434,63)	(4,19)
2022	(Rp. 8.308,94)	Rp. 427,01	(Rp. 8.735,95)	(2.752.62)

Sumber: PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) (data diolah).

(134-141) E-ISSN: 3025-0099
DOI: https://doi.org/10.64405/jm.v2i2.96

Dari Tabel 3. Efektivitas terhadap laba perusahaan menjadi tidak efektif kecuali laba tahun 2019 sangat efektif. Dengan demikian, pendapatan non usaha masih menjadi penopang utama pendapatan perusahaan. Hal tersebut tergambar pada tahun 2018 sampai tahun 2020 laba usaha sebagian besar diperoleh dari pendapatan non usaha berupa bunga deposito Bahkan mulai tahun 2020 pendapatan non usaha sebagai penyumbang utama untuk biaya operasional dan usaha perusahaan. Dalam penelitian ini pendapatan non usaha (lain-lain) dicoba dikeluarkan dari perhitungan efektivitas usaha BUMD karena memang bukan bidang usaha PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda).

Sebagaimana tujuan pendirian PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) adalah untuk memperoleh laba dan meningkatkan sumber PAD. Dari perolehan laba terlihat bahwa perusahaan memperoleh laba pada tahun 2018 dan tahun 2019. Selanjutnya mulai tahun 2020-2022 mengalami kerugian dalam usaha. Dengan demikian, perusahaan belum maksimum dalam mendapatkan laba usaha. Karena seringnya merugi dalam usaha, maka yang terjadi jumlah aset yang sudah mencapai sebesar Rp.48.328.490.000,00 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah aset menjadi sebesar Rp. 46.731.688.835,00 dan tahun 2022 jumlah aset menjadi sebesar Rp38.430.521.222,00.

Fakta lain yang ditemukan juga karena sering merugi, maka setoran PAD kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga sangat terbatas. Hal ini terjadi karena sumber setoran PAD adalah dari keuntungan usaha yang disisihkan, sedangkan yang terjadi adalah seringnya terjadinya kerugian usaha. Dengan demikian maka BUMD PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) belum optimal dalam kontribusi terhadap PAD. Dari uraian di atas, direkomendasi untuk dilakukan pembenahan manajemen dalam usaha mulai dari perencanaan usaha harus didukung dengan hasil studi kelayakan yang memang layak diusahakan baik secara teknis maupun ekonomis. Hal ini terlihat dari regulasi yang mengatur unit usaha BUMD yang diusahakan belum diminati sektor swasta (usaha perintisan). Sektor usaha kepelabuhan yang banyak menghasilkan keuntungan sudah diusahakan oleh BUMN seperti Pelindo, ASDP, Pelni, dll. Selain itu sektor swasta juga banyak menguasai bisnis kepelabuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa bisnis kepelabuhan yang menguntungkan sudah banyak diusahakan baik oleh BUMN maupun swasta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh oleh peneliti dengan berbagai sumber data dapat disimpulkan BUMD PT. Pelabuhan Kepri belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada PAD dikarenakan terdapat penurunan Laba beberapa tahun terakhir berdampak terhadap setoran PAD kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terbatas.

REFERENSI

Antika, Ike Juni. 2017. *Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan PAD Di Kota Bandarlampung dalam Perspetif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015*. Skrispsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Funangi, Usman, dkk. 2017. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua*.

Hartoto. 2018. *Analisis Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Tabir STAI Miftahul Ulum, Tanjungpinang. Edisi II Juni 2018.

Provinsi jawa dalam perspektif ability, motivation, oportunity. I N O V A S I - 17 (1), 2021;10-18 http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI

https://koran.tempo.co/read/info-tempo/484773/peraih-gelar-bumd-award-2 023

https://www.kaltimprov.go.id/berita/bumd-diharapkan-jadi-sumber-pendapa tan-utama-pemerintah- daerah

https://www.bajangjournal.com/index.p h p/JCI/article/view/1703/1240

http://repository.unwira.ac.id/4945/

https://kepriprov.go.id

https://bpkad.kepriprov.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Undang Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan badan usaha PT. Pelabuhan Kepri.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Pelabuhan Kepri.